

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan situasi politik di dunia yang dibarengi dengan multiplikasi aktor serta teknologi dalam kajian hubungan internasional membuat praktik diplomasi menjadi semakin luas, tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara, namun juga bagaimana sebuah organisasi internasional melakukan diplomasi kepada negara-negara di dunia secara bersamaan. Dalam konteks ini, organisasi internasional yang dimaksud ialah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang acap kali melakukan diplomasi publik untuk tujuan dari isu tertentu yang dianggap relevan dengan kepentingan masyarakat internasional.

Sebagai aktor non-negara yang berbentuk sebagai Organisasi Internasional, PBB mengangkat isu-isu internasional melalui diplomasi publik. Seperti isu mengenai demokrasi (Annan A. Kofi, 2002), hak asasi manusia (Vogelgesang, 1979), supremasi hukum (United Nations, 2020), perubahan iklim (Lestari, 2021), bencana (Aminah, 2019), dan berbagai isu global lainnya yang juga telah menjadi landasan PBB untuk melakukan praktik diplomasi publik. Pada tahap ini, artinya PBB telah meletakkan perhatiannya terhadap isu-isu dunia sejak lama dengan melakukan diplomasi publik kepada negara-negara lain. Urgensi dari dilakukannya diplomasi publik adalah atas keyakinan akan pentingnya diskusi publik dan pentingnya opini publik dunia terhadap isu bersama. Dengan menysasar sorotan opini publik terhadap suatu situasi, paparan publik ini dinilai dapat membekukan suatu situasi dan mencegah suatu situasi semakin memburuk pada masyarakat internasional. Sehingga

memberikan pemahaman kepada masyarakat internasional terhadap suatu isu merupakan capaian yang penting dalam diplomasi publik (Hovet & JR, 1963).

Perkembangan diplomasi publik yang semakin terus mengalami perkembangan, yang mana perkembangan tersebut dapat dilihat dari banyaknya pihak yang dapat mewakili lembaga maupun negara dalam melakukan diplomasi. Salah satu pihak yang digunakan sebuah lembaga maupun negara tersebut untuk menjadi sarana dalam melakukan diplomasi yang paling sering terjadi ialah dengan melibatkan *public figure* atau selebriti. Keterlibatan *public figure* ataupun selebriti dalam melakukan diplomasi muncul sebagai sebuah inisiatif yang mana jika dahulu diplomasi hanya berpusat pada sebuah negara ataupun lembaga saja, dengan adanya keterlibatan *public figure* dan juga selebriti dalam melakukan diplomasi tentu saja akan mempengaruhi sebuah proses dalam pengambilan keputusan (Wheeler, 2011).

Pada kesempatan-kesempatan sebelumnya PBB melibatkan beberapa *public figure* dalam upayanya melakukan publik diplomasi. Seperti halnya pada tahun 2014, PBB melibatkan Emma Watson yang pada saat itu terpilih menjadi *UN Goodwill Ambassador* bersamaan dengan PBB, Emma Watson mengkampanyekan isu mengenai kesetaraan gender dan di akhir pidatonya Emma mengajak semua orang untuk turut andil dalam kampanye kesetaraan gender yang digagas oleh PBB HerForShe (Afrisia, 2014).

Kemudian di tahun yang sama yakni pada tahun 2014, PBB kembali melibatkan selebriti terkenal lainnya seperti Leonardo DiCaprio untuk berpidato dalam kongres PBB yang mana pada kesempatan tersebut Leonardo DiCaprio ditunjuk

langsung oleh Sekretaris Jenderal yang menjabat pada saat itu dalam utusan pedamaian PBB yang berfokus pada perubahan iklim. Dalam kongres tersebut Leonardo DiCaprio memberikan pidato dan mengajak kepada pemimpin seluruh dunia untuk melawan perubahan iklim (Kompas.com, 2021).

Kembali lagi PBB melibatkan seorang public figure dalam upayanya melakukan diplomasi publik, yakni di tahun 2019 Jason Momoa aktor yang terkenal melalui perannya dalam film Aquaman yang juga menjadi aktivis lingkungan hidup khususnya soal laut. Pada pertemuan *Small Island Developing States* (SIDS) di markas PBB di New York dengan semangat Jason Momoa menyampaikan pidato dan menyoroti pentingnya persatuan dalam skala global untuk melindungi dan melestarikan lingkungan (Rezkisari, 2019).

PBB juga pernah melibatkan BTS pada tahun 2018 pada upacara peluncuran UNICEF's *Generation Unlimited* pada sidang umum PBB ke-73. Yang mana pada upacara tersebut BTS memberikan pidato dan mengkampanyekan album mereka yang bertajuk "Love Myself" untuk mengakhiri kekerasan terhadap pemuda (Hasibuan, 2020) Hingga pada akhirnya, di tahun 2021 untuk kedua kalinya BTS diutus kembali sekaligus mendampingi presiden Korea Selatan Moon Jae In untuk menghadiri serta memberikan pidato pada sidang umum PBB ke-76 (Alamsyah, 2021). Kehadiran BTS sendiri berhasil menarik perhatian masyarakat internasional, terbukti dengan meningkatnya jumlah penonton dari Sidang Umum PBB yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menempati posisi trending pada aplikasi tersebut (Pristiandaru, 2021). Dalam sidang umum tersebut,

member BTS secara bergantian memberikan pidato dari mulai vaksin, pandemi Covid-19, hingga generasi muda saat ini. Mereka juga menyampaikan pengalaman generasi muda, serta bagaimana pandangan mereka tentang jalan masa depan mereka dibentuk oleh pandemi. Para member BTS juga menyampaikan bahwa para penggemarnya telah menghabiskan waktu kurang lebih dua tahun untuk mempelajari hal-hal baru secara online akibat pandemi Covid-19, mempelajari isu-isu, dan mempelajari bagaimana mereka dapat membuat perubahan. BTS juga menyampaikan harapan mereka agar generasi mereka dapat diapresiasi karena kemampuannya menciptakan dunia yang positif dan sehat melalui komunitas online mereka, bukan sebagai korban yang kehilangan kesempatan akibat pandemi (tim detikom, 2021)

Dengan melibatkan sosok *public figure* dalam upaya melakukan diplomasi publik dinilai cukup memberikan dampak atau pengaruh yang cukup baik kepada masyarakat internasional, mengingat apa yang telah dilakukan oleh PBB pada kesempatan-kesempatan sebelumnya dengan melibatkan selebritis yang memiliki nilai popularitas dalam masyarakat internasional. Menurut (Street, 2006), politik dan budaya populer dapat dilihat sebagai sebuah program dimana popularitas menjadi mata uang dengan produk dari bintang populer, yang mana nantinya dengan pendekatan tersebut dapat mempengaruhi sebuah kepentingan politik. Nilai-nilai populer yang dimiliki oleh selebriti tersebut kemudian mampu memberikan kontribusi untuk memberi dan menyebarkan nilai-nilai sosial kepada masyarakat internasional yang mana nilai-nilai yang banyak dibahas pada saat ini adalah nilai-nilai kemanusiaan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana diplomasi publik PBB dalam melibatkan BTS melalui kampanye Gen Unlimited tahun 2021?

C. Kerangka Konsep

1. Diplomasi Publik

Diplomasi publik dipahami sebagai sebuah konstruksi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah di suatu negara terhadap khalayak publik internasional yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai isu yang tengah diangkat dari negara, sikap, intitusi, budaya, kepentingan nasional dan berbagai kebijakan yang sedang diperjuangkan oleh entitas negara (Christopher, 2003) Di dalam buku yang berjudul *Public Diplomacy: Lessons from the Past* karya Nicholas J. Cull menyebutkan:

“public diplomacy is an international actor’s attempt to manage the international environment through engagement with a foreign public”

Artinya bahwa diplomasi publik adalah upaya pelaku internasional untuk mengelola lingkungan internasional dengan melibatkan publik asing (Nicholas J. Cull, 2009) Di dalam artikel lain, yang mengutip buku Jan Mellisen (2006) menyebutkan bahwa diplomasi publik sebagai usaha untuk mempengaruhi orang atau organisasi lain di luar negaranya dengan cara positif sehingga mengubah cara pandang orang tersebut terhadap suatu negara dan isu publik tertentu (Hennina Citra, 2009).

Istilah diplomasi publik muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1965 (Cull J. Nicholas, 2006) dan diperkenalkan oleh Edmund Gullion selaku dekan *Flecher School of Law and Diplomacy* di Tufts University yang juga merupakan mantan diplomat Amerika Serikat. . Seperti yang tertulis dalam artikel

Nicholas J. Cull yang berjudul “*Public Diplomacy Before Gullion: The Evolution of A Phrase*” yang dikutip dalam brosur Murrow Center (Cull J. Nicholas, 2006):

“Diplomasi publik ialah berkaitan dengan pengaruh sikap publik terhadap pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Hal ini meliputi dimensi dari Hubungan Internasional melampaui diplomasi tradisional, penanaman opini publik oleh pemerintah terhadap negara lain, interaksi dari kelompok dan kepentingan pribadi dalam suatu negara dengan negara lain, pelaporan urusan luar negeri dan dampaknya terhadap kebijakan, komunikasi antara diplomat yang memiliki pekerjaan sebagai komunikator dengan koresponden asing, serta proses komunikasi antar budaya”.

Konsep diplomasi publik dapat diartikan sebagai upaya sebuah negara dalam melakukan praktik diplomasi yang mengikutsertakan aktor-aktor baik aktor negara maupun aktor non-negara dalam penyampaian pesan dan pembentukan persepsi baik dari masyarakat domestik maupun masyarakat internasional mengenai identitas, nilai, dan juga kebijakan negara. Adanya globalisasi membawa dampak yang begitu pesat bagi seluruh aspek baik itu kehidupan, teknologi, dan tidak terkecuali membawa dampak pula terhadap gaya dalam berdiplomasi. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, telah melahirkan jenis diplomasi publik baru dengan cara yang lebih modern. Yang mana jika pada diplomasi publik lama menggunakan cara-cara

tradisional dalam berkomunikasi, hanya berbasis pada pemerintah dan masyarakat asing, hadirnya diplomasi publik baru membuat jalannya diplomasi menjadi semakin luwes. Cara-cara berdiplomasi yang semula hanya dilakukan dengan cara *government to people*, kini di praktiskan dengan *people to people* yang melibatkan partisipasi dari masyarakat domestik untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat internasional (Melissen Jan, 2005).

2. Organisasi Internasional

Seiring dengan dinamika yang semakin kompleks untuk hubungan antar negara secara global, maka perlu sebuah wadah resmi yang disepakati negara-negara dunia dalam bentuk organisasi internasional untuk mengakomodir hubungan antar negara dan isu-isu internasional. Menurut (Rudy, 1998) telah memaparkan bahwasanya organisasi internasional dapat di definisikan sebagai:

“sebuah pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.”

Maka dari itu, organisasi internasional memiliki sifat lebih cenderung kepada kepentingan antar lintas batas negara, baik regional maupun internasional, serta memiliki tujuan-tujuan tertentu yang sudah disepakati bersama untuk berupaya

menyelesaikan isu-isu tertentu secara bersama-sama. Dari alasan ini, organisasi internasional organisasi internasional pada akhirnya terus tumbuh dengan didasari pada kepentingan masyarakat internasional yang memerlukan tempat atau bahkan alat untuk mencapai tujuan. Organisasi internasional merupakan sebuah struktur formal yang memiliki sifat berkelanjutan yang telah dibentuk atas persetujuan dari para anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara-negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan anggota di dalamnya dan masyarakat internasional.

Lebih jauh lagi, organisasi internasional secara terstruktur memiliki serangkaian regulasi, jadwal, anggota, dan tempat yang jelas. Sehingga sebuah organisasi internasional tidak hanya terbatas pada gerakan-gerakan untuk menjaga perdamaian, tetapi juga mengenai isu-isu sosial (Reinalda, 2013) Di dalam (Archer, 2015), menjelaskan bahwa terdapat beberapa peranan dari organisasi internasional yakni:

- a. Sebagai instrumen (alat atau sarana)
Sebuah organisasi internasional dapat digunakan oleh negara-negara di dunia yang masuk kedalam urusan keanggotaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu yang didasari oleh tujuan politik luar negeri.
- b. Sebagai Arena (forum atau wadah)
Sebuah organisasi internasional ialah sebagai tempat pertemuan bagi anggota-anggotanya yakni negara-negara di dunia untuk dapat mendiskusikan sebuah isu internasional yang tengah dicoba untuk diselesaikan. Namun dalam banyak kasus, sebuah organisasi internasional juga acap

kali menjadi tempat bagi sebuah negara yang mengangkat isu dari negara lain dengan tujuan untuk memperoleh perhatian internasional.

- c. Sebagai aktor independen
Sebuah organisasi internasional dapat merumuskan keputusan-keputusan sendiri tanpa pengaruh dari kekuasaan dan juga paksaan dari pihak non-anggota.

Selain itu, mengenai fungsi organisasi internasional menurut (Bennet, 1991) yakni:

- a. Menyediakan berbagai hal yang dibutuhkan bagi keberlangsungan kerja sama antar negara dimana kerja sama itu menghasilkan keuntungan.
- b. Menyediakan berbagai macam fasilitas berupa opsi mengenai saluran-saluran komunikasi antar pemerintah, dengan tujuan untuk mempersatukan pendapat dan ide ketika menghadapi sebuah permasalahan.

D. Hipotesis

Dengan menggunakan kerangka konsep diplomasi publik dan juga organisasi internasional, maka menunjukkan bahwa hipotesa dalam penelitian ini ialah diplomasi publik yang dilakukan oleh PBB dengan melibatkan BTS pada tahun 2021 sebagai instrumen diplomasi publik ialah karena PBB menganggap bahwa BTS memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat internasional khususnya para penggemarnya yang didominasi oleh generasi milenial yang kemudian berdampak terhadap pembentukan awareness atau kesadaran untuk selalu mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri sendiri.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Creswell, 2010) Sedangkan pendekatan studi kasus merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan (Gerring, 2004) Metode ini akan membantu penulis dalam mengkaji implikasi Diplomasi Publik PBB dalam melibatkan BTS dari Korea Selatan pada tahun 2021.

Penulis menggunakan metode kajian pustaka untuk menjelaskan studi kasus yang diambil. Kajian pustaka bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen, berita, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang dapat mendukung penulisan dalam penelitian ini (Bungin, 2010).

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini diberikan batasan pada saat PBB melakukan diplomasi publik dengan melibatkan BTS pada sidang umum PBB pada tahun 2018 hingga 2021.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini akan ditulis menjadi 4 bab yang saling berhubungan, adapun sistematika tersebut ialah sebagai berikut:

BAB I : pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : bab ini akan menjelaskan mengenai sejarah atau linimasa diplomasi publik yang dilakukan oleh PBB

BAB III : dalam bab ini akan menjelaskan mengenai alasan PBB melibatkan BTS sebagai instrumen untuk melakukan diplomasi publik.

BAB IV : bab ini berisi penutup dan kesimpulan terkait hasil penelitian yang telah dilakukan.